

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara menggunakan Pendekatan *Deep Interview*

Nur Aulyah Maulida¹, Basri Bado², Irwandi³

¹ Universitas Negeri Makassar, e-mail: nurmaulidaaulyah@gmail.com

² Universitas Negeri Makassar, e-mail: basri.bado@unm.ac.id

³ Universitas Negeri Makassar, e-mail: irwandi@unm.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
29-08-2024

Direvisi:
04-01-2025

Diterima:
06-01-2025

Keywords

: *Poverty Alleviation, SDGs, Government Policy*

ABSTRACT

This study aims to determine the process and success of poverty alleviation carried out by the North Luwu district government. The data used in this study are cross-section data. The method of determining respondents is by using purposive random sampling which is snowball sampling. The research method used is a case study method with a qualitative approach. Data collection methods are observation and direct interviews. The data analysis technique uses QDA (Qualitative Data Analysis) which is divided into 4 important processes, namely, data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions (verification). The results of the study show that the main cause of poverty in North Luwu district is due to lack of income to meet basic needs such as food, housing, education and health, to meet these needs will always be related to spending. The largest expenditure comes from non-food expenditures, namely in housing and household facilities or the highest of all components of non-food needs of a household. Therefore, the government provides "house renovation" assistance through the BSPS program to poor people who have uninhabitable houses. In addition, other assistance such as BPNT, PKH and PBI are also given in cash to people who are categorized as poor in North Luwu Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan keberhasilan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah kabupaten Luwu Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data cross section. Metode penentuan responden yaitu dengan menggunakan purposive random sampling yang bersifat snowball sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara langsung. Teknik analisis data menggunakan QDA (Qualitative Data Analysis) yang terbagi atas 4 proses penting yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama kemiskinan di kabupaten Luwu Utara dikarenakan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan dan kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan itu akan selalu berkaitan dengan pengeluaran. Pengeluaran terbesar berasal dari pengeluaran non-makanan, yaitu di kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga atau tertinggi dari seluruh komponen kebutuhan non-makanan dari sebuah rumah tangga. Oleh sebab itu pemerintah memberikan bantuan "bedah rumah" melalui program BSPS kepada masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Selain itu bantuan lain seperti BPNT, PKH dan PBI juga diberikan secara tunai kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin di kabupaten Luwu Utara.

Kata Kunci

: *Penanggulangan Kemiskinan, SDGs, Kebijakan Pemerintah*

Corresponding Author

: Nur Aulyah Maulida, e-mail: nurmaulidaaulyah@gmail.com

PENDAHULUAN

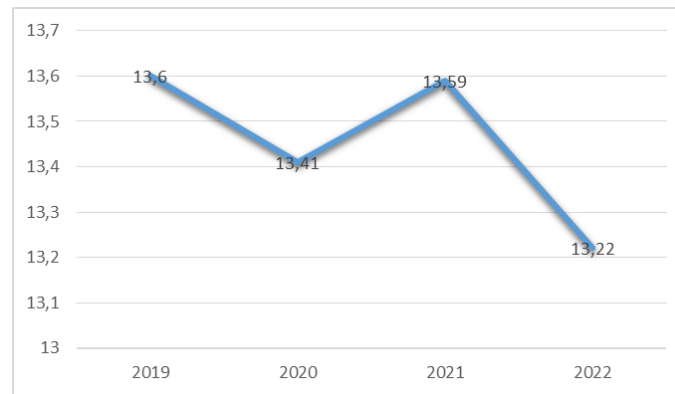
Dalam pembangunan nasional, hal yang perlu diperhatikan salah satunya yaitu kondisi wilayah. Hal ini dikarenakan pembangunan suatu wilayah tidak bisa diseimbangkan apabila masih ada masalah sosial seperti kemiskinan dan faktor lainnya. Perencanaan pembangunan nasional dapat diwujudkan melalui beberapa cara salah satunya penanggulangan kemiskinan suatu wilayah yang diwujudkan melalui Registrasi Sosial-Ekonomi (Regsosek) agar terdapat gambaran yang jelas dan akurat mengenai tingkat kesejahteraan, kondisi rumah tangga, hingga berbagai aspek kehidupan masyarakat agar mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah (Perekonomian & Indonesia, 2024) Indonesia belum bisa terpisah dari permasalahan kemiskinan baik itu secara absolut maupun relatif. Secara relatif dalam suatu kelompok masyarakat selalu ada kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, dalam artian kemiskinan relatif mengacu pada kebijakan pembangunan yang belum merata dan menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat. Sedangkan secara absolut di mana kondisi seseorang tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi kebutuhannya (Dongoran et al., 2023).

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional karena dinilai memiliki keterkaitan dengan pendidikan, kesehatan, serta sumber daya manusia. Oleh karenanya, dibutuhkan mitigasi penanggulangan kemiskinan melalui proses dan desain yang integratif, kolektif, dan kolaboratif (Sahar & Salomo, 2018). Kemiskinan juga termasuk isu yang mempengaruhi banyak sektor yang selalu berkembang namun tetap terbilang kompleks. Kemiskinan memiliki tolak ukur berdasarkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan (Michael Page, 2022)

Word Bank (2004) dalam (Davis & Sanchez-martinez, 2014) memperluas definisi tersebut lebih lanjut dengan menunjukkan bahwa kemiskinan adalah didefinisikan sebagai penurunan kesejahteraan yang nyata, yang mencakup banyak dimensi. Dimensi ini mencakup pendapatan rendah, ketidakmampuan untuk memperoleh barang dan jasa dasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup yang bermartabat, rendahnya tingkat kesehatan yang baik dan pendidikan, buruknya akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta tidak memadainya kapasitas dan peluang untuk meningkatkan kehidupan.

Sesuai Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan dijelaskan bahwa keanggotaan tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan (Soares, 2015).

Sulawesi Selatan tercatat memiliki luas wilayah 45.764,53 km² yang meliputi 21 kabupaten dan 3 Kota. Terkait dengan isu kemiskinan ada 3 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang kemiskinannya tergolong tinggi diantaranya yaitu Kabupaten Pangkep, kedua Kabupaten Jeneponto dan yang ketiga Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara memiliki presentase kemiskinan yang turun setiap tahunnya namun masih tidak bisa lepas dari isu kemiskinan itu sendiri. Berikut grafik presentase penduduk miskin provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 – 2022.



Gambar 1. Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019-2022

Digambarkan secara jelas dalam grafik di atas bahwa kemiskinan di Kabupaten Luwu utara tetap turun sedikit demi sedikit walaupun sempat naik kembali pada tahun 2021 dan turun kembali pada tahun 2022 sebesar 13,22%. Penurunan presentase penduduk miskin ini tidak menjadikan Luwu Utara bisa tergeser dari tiga besar presentase penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada beberapa parameter dalam menentukan kemiskinan dengan menggunakan *Basic Needs Approach*, konsep ini berlandaskan pada *Hanbook on Poverty and Inequality* yang dicetuskan oleh Wordbank. Dalam pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Badan Pusat Statistik, 2023).

Menurut Sharp dan Kuncoro (2006) dalam (Zaqiah et al., 2023) salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya sumber daya manusia yang disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan lainnya. Pembangunan dalam bidang pendidikan merupakan pilar untuk membentuk human capital dalam pembangunan ekonomi yang merupakan investasi jangka panjang bagi suatu negara seperti yang dijelaskan dalam human capital theory bahwa seorang individu berinvestasi dalam pendidikan dengan harapan bahwa investasi tersebut akan memberikan manfaat berupa pendapatan yang lebih tinggi (Eide & Showalter, 2010).

Tabel 1. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2022

Distribusi PDRB ADHB (Pengeluaran)				
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	57,34	57,59	58,14	56,81
Konsumsi LNPRT	1,19	1,17	1,1	1,15
Konsumsi Pemerintah	10,93	10,7	11,2	9,73
Modal Tetap Bruto (Gross Fixed Capital Formation)	31,61	31,85	30,36	29,62

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa konsumsi rumah tangga menurun dari tahun 2021 sampai 2022 sebesar 1,33% dan investasi dalam negeri terus menurun sejak tahun 2020. Sedangkan jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi mulai membaik setelah puncak covid-19 pada tahun 2020 yang membuat pertumbuhan ekonomi kabupaten Luwu Utara menyentuh angka minus yaitu sebesar -0,59%. Dan meningkat kembali pada tahun 2021 - 2022 yang mencapai 4,54%

Dengan adanya tingkat kemiskinan yang masih tinggi yang dilihat dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi dan investasi maka kemiskinan menjadi hal yang krusial untuk dibahas dan ditanggulangi, dengan adanya isu tersebut maka penulis bermaksud mengangkat judul tentang Analisis Penanggulangan Kemiskinan Studi Kasus Kabupaten Luwu Utara.

Rujukan penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya “*Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara*” temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kabupaten Batu Bara sudah cukup terealisasi dengan baik. Karena dari proses administrasi, proses sosialisasi dan proses penyalurannya pun sudah sesuai dengan prosedur dari pemerintah pusat, sehingga bantuan sosial tersebut benar-benar diperuntukkan kepada masyarakat di Kabupaten Batu Bara (Pratiwi & Imsar, 2022).

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penanggulangan kemiskinan di kabupaten luwu utara dan mengetahui keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten luwu utara serta mengetahui kebijakan yang diterapkan pemerintah kabupaten luwu utara dalam menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan strategi yang dapat dioptimalkan melalui pendekatan deep interview.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan ketiga teknik pengumpulan data tersebut peneliti akan memperoleh data yang lengkap dan mempermudah peneliti dalam mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Model Analisis Interaktif Miles and Huberman. (Miles A.M, 1994) dalam bukunya “*Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*” menjelaskan secara umum bahwa proses analisis data kualitatif melibatkan empat proses penting. Keempat proses tersebut diantaranya pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, hasil dari penelitian responden dan pemerintah kabupaten Luwu Utara dibedakan menjadi perempuan dan laki-laki. Adapun jumlah responden yang diperoleh selama penelitian yaitu 55 responden yang terbagi atas 2 bagian yaitu pemerintah dan masyarakat.

Pendidikan

Terlepas dari apapun pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas sebuah daerah. Rendahnya pendidikan disuatu daerah akan menyebabkan kurangnya daya saing masyarakat dalam kemampuan dan keahlian untuk mencari pekerjaan dan rendahnya kualitas pendidikan juga menjadi penyebab dari krisis sumber daya manusia (Binus University, 2020).

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Miskin Kabupaten Luwu utara

Tingkat Pendidikan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Tidak Sekolah	9	18%
SD	23	46%
SMP	11	22%
SMA	6	12%
S1	1	2%
Total	50	100%

Sumber : Data Primer 2024 (Diolah)

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pendidikan masyarakat miskin Kabupaten Luwu Utara di dominasi oleh Sekolah Dasar Sederajat (SD) dengan jumlah 23 orang atau sekitar 46% dari total responden. Sedangkan presentase pendidikan terendah ada dikalangan perguruan tinggi atau sarjana hanya 1 orang atau sekitar 2% dari total responden.

Usia

Usia merupakan salah satu faktor penting dalam memengaruhi produktivitas seseorang. Dalam hal ini kemampuan fisik atau cara berpikir untuk bekerja. Adapun klasifikasi usia masyarakat miskin di Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan tabel klasifikasi usia di bawah ini, presentase usia masyarakat miskin tertinggi berada pada usia 40-50an yaitu sekitar 48% sedangkan presentase usia terendah hanya sebanyak 4 orang atau sebesar 7% dari total responden. Hal ini berarti masyarakat miskin kabupaten Luwu Utara didominasi oleh usia yang masih produktif. Namun, jika dilihat dari kenyataannya beberapa responden di usia tersebut yang tinggal sendiri dan sudah tidak bekerja.

Tabel 3. Klasifikasi Usia Masyarakat Miskin Kabupaten Luwu Utara

Tingkat Usia	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
20-30	4	8%
30-40	17	34%
40-50	25	50%
50-60	4	8%
Total	50	100%

Sumber : Data Primer 2024 (Diolah)

Status Responden

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan dua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat, untuk menggali lebih dalam terkait informasi mengenai penanggulangan kemiskinan di kabupaten Luwu Utara

Tabel 4. Status Responden

Status	Frekuensi (orang)	Persentase
Masyarakat	50	95%
Pemerintah	5	5%
Jumlah	55	100%

Sumber : Data Primer 2024 (Diolah)

Berdasarkan tabel klasifikasi status responden di atas peneliti memilih 2 jenis fokus penelitian yang diwawancarai yaitu masyarakat sebesar 95% dan kalangan pemerintah sebesar 5%, dimana pemerintah sebagai pelaksana atau pengambil kebijakan dan masyarakat sebagai target dan sasaran.

Domisili

Tabel 5. Klasifikasi Domisili Masyarakat Kabupaten Luwu Utara

Domisili (Kecamatan)	Frekuensi (orang)	Persentase
Baebunta	50	95%
Masamba	5	5%
Jumlah	55	100%

Sumber : Data Primer 2024 (diolah)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti ada beberapa kecamatan yang memiliki masyarakat miskin terbanyak yaitu kecamatan Baebunta sebesar 95%, Kecamatan Masamba sebesar 5% dari kalangan pemerintah.

Pendapatan dan Jumlah Tanggungan

Tabel 6. Klasifikasi pendapatan dan jumlah tanggungan masyarakat Miskin Kabupaten Luwu Utara

Pendapatan	Frekuensi (orang)	Persentase
Tidak bekerja	1	2%
100.000-300.000	22	44%
400.000-500.000	19	38%
≥ 500.000	4	8%
Tidak menentu	4	8%
Jumlah	50	100%

Sumber: Data Primer 2024 (diolah)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dihasilkan ada beberapa klasifikasi pendapatan dalam masyarakat miskin kabupaten Luwu Utara. Klasifikasi dengan persentase tertinggi yaitu pendapatan 100.000-300.000 sebesar 46% dan persentase terendah yaitu pendapatan 0-100.000 dengan presentase sebesar 2%.

B. Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Utara

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhan akan selalu mengarah pada pengeluaran. Kondisi di Kabupaten Luwu Utara pengeluaran dibagi 2 yaitu makanan dan non-makanan hal ini sejalan dengan adanya gagasan dalam teori neo-klasik dalam pendekatan moneter bahwa “kesejahteraan dapat diukur dari total konsumsi individu yang diperkirakan berdasarkan data pengeluaran dan pendapatan” (Rowntree, 1901). Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan Kepala Bappelitbangda kabupaten Luwu Utara peneliti menemukan penyebab tingginya kemiskinan di kabupaten Luwu Utara serta cara penanggulangan pemerintah terkait permasalahan kemiskinan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara yaitu peraturan bupati tentang sinergitas program dan

kegiatan serta kriteria penerima manfaat (Peraturan Bupati Nomor 39 Lembaran, 2017). Selanjutnya pada akhir tahun 2023 kepala Bappelitbangda kabupaten Luwu Utara menggerakkan pasukan sekitar 94 orang untuk turun menyasar 140 desa melakukan monev tematik dengan pendekatan melihat rumah tangga miskin yang tersisa yang belum terdata namun sebelumnya telah dilakukan kegiatan monev tematik per SKPD yang menghasilkan cakupan data berdasarkan desa yaitu desa non-monev ada 33 atau sekitar 19% dan desa Monev 140 desa atau sekitar 81% hal inilah yang termasuk langkah-langkah kami dalam menurunkan kemiskinan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial, Kepala Bappelitbangda dan masyarakat miskin Kabupaten Luwu Utara ada empat program utama yang sedang dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan. Diantaranya yaitu :

1. BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), Kabupaten Luwu Utara ini Bantuan ini diberikan secara tunai kepada masyarakat per kartu keluarga sebesar Rp. 200.000 per-bulan. Kepala Dinas Sosial mengatakan bahwa setiap masyarakat yang menerima bantuan ini memerlukan pendamping agar bantuan yang diterima tersebut tidak disalah gunakan.
2. PBI (Penerima Bantuan Iuran), Program Bansos PBI JK adalah bantuan sosial dari pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam bidang kesehatan. Dengan menjadi penerima bantuan ini, masyarakat tidak perlu membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri karena sudah ditanggung oleh pemerintah. Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Utara
3. PKH (Program Keluarga Harapan), Di kabupaten Luwu Utara bantuan ini dibagi atas 3 Komponen di antaranya Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Setiap komponen memiliki jumlah bantuan yang berbeda-beda Sekolah Dasar (SD) menerima bantuan sebesar Rp. 900.000 pertahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima bantuan sebesar Rp. 1.500.000 pertahun dan Sekolah Menengah Atas (SMA) menerima bantuan sebesar Rp. 2.000.000 pertahun. Bantuan PKH ini kadang diberikan semua secara langsung kadang juga diberikan secara angsuran misalnya 4 atau 3 kali dalam setahun
4. Program BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), Bantuan Bedah Rumah Lewat Program BPS yang dipusatkan di Bappelitbangda Kabupaten Luwu utara. Bantuan ini ditujukan kepada masyarakat miskin yang memiliki rumah yang sudah tidak layak huni dengan tujuan meringankan beban non-konsumsi masyarakat miskin.

C. Keberhasilan Penanggulangan Kemiskinan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Sosial dan Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dapat dikatakan bahwa penanggulangan kemiskinan kabupaten Luwu Utara dikatakan berhasil karena Luwu Utara mampu naik 2 anak tangga sekaligus untuk melewati gelar termiskin yang disandang Luwu Utara selama 10 tahun terakhir hingga ke peringkat ke-5 dari peringkat 3 termiskin di Sulawesi Selatan.

“Turunnya kemiskinan di kabupaten Luwu Utara disebabkan oleh adanya intervensi pemerintah dari sisi monev tematik yang mana hasil dari monev tematik ini mengeluarkan kebijakan yaitu memberikan bantuan bedah rumah lewat program BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadya) kepada masyarakat miskin”.

“Dimulai dari tahun 2020 kami pemerintah berusaha menurunkan kemiskinan melalui ada yang namanya program BPS atau biasa disebut bedah rumah kami memberikan kepada masyarakat berupa bantuan untuk meringankan beban non-makanan dalam suatu keluarga miskin dan tercatat sampai pertengahan tahun ini kami sudah memberikan bantuan ini kurang lebih 2000-4000 rumah dan diakumulasikan dengan masyarakat yang terdampak banjir bandang kemarin sudah sekitar 5000an rumah tangga yang kami bantu.”

“Berkat hasil intervensi yang telah kami lakukan kami dapat mengatakan bahwa program yang kami jalankan dengan beberapa pihak terkait termasuk Dinas sosial hasil data terakhir membuktikan kemiskinan kabupaten Luwu Utara telah mengalami penurunan dengan persentase sekarang yaitu 12,66% (Kepala Bappelitbangda 2024)

Kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara awalnya pada tahun 2021 sebesar 13,59% dan tahun berikutnya turun menjadi 13,22% dan data terbaru tahun 2023 kemiskinannya turun kembali menjadi 12,66%. Secara garis besar kemiskinan di kabupaten Luwu Utara dikategorikan sebagai kemiskinan absolut dimana kemiskinan absolut disebabkan oleh kurangnya pasokan air bersih dan perumahan masyarakat yang tidak layak huni. Berdasarkan data lapangan turunnya kemiskinan di kabupaten Luwu Utara disebabkan oleh adanya intervensi pemerintah dari sisi movev tematik yang mana hasil dari monev tematik ini mengeluarkan kebijakan yaitu memberikan bantuan bedah rumah lewat program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadya) kepada masyarakat miskin. Hal ini merupakan salah satu indikator yang membuat keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara sudah mulai terlihat di tahun 2023 ini yang dibuktikan dengan data kemiskinan yang sudah turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian ini tidak lepas dari keterlibatan pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah hal ini sejalan dengan “Teori Sosial Demokrat” yang menyarankan peranan pemerintah untuk menanggapi kemiskinan yang sumber anggarannya dari Pemerintah Pusat, Provinsi Sulawesi Selatan, Pemda Luwu Utara.

Melihat situasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara sudah terlaksana dengan baik menurut pemerintah dan memang jika dilihat dari data yang tersedia sekarang terbukti bahwa kemiskinan telah mengalami penurunan jauh dari tahun-tahun sebelumnya, namun kembali lagi dari pihak masyarakat miskin yang telah ditemui peneliti ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa pemberian bantuan seperti BPNT, PKH ini belum merata dalam artian ada masyarakat yang layak mendapatkan bantuan namun belum diberi bantuan dan ada juga masyarakat yang terlihat tidak perlu diberikan bantuan tapi pada kenyataannya masih menerima bantuan.

Pada intinya kebijakan yang pemerintah ambil terkait program-program untuk masyarakat miskin di kabupaten Luwu Utara sudah dikonfirmasi bahwa benar dengan adanya bantuan yang diberikan akan membantu meringankan beban masyarakat miskin namun hal ini tidaklah menjadikan masyarakat tersebut tidak miskin. Misal diberikan bantuan pangan namun diberikan secara tunai setiap bulannya, hal ini tentu menurut masyarakat membantu perekonomiannya namun tidak menjadikan masyarakat tersebut tidak miskin.

PENUTUP

Kemiskinan kabupaten Luwu Utara disebabkan karena pengeluaran terbesar berasal dari pengeluaran non-makanan, yaitu di kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga yang mencapai 24,53% atau tertinggi dari seluruh komponen kebutuhan non-makanan dari sebuah rumah tangga. Oleh karena itu selain bantuan tunai yang diberikan kepada masyarakat program bedah rumah merupakan fokus utama yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam menanggulangi kemiskinan.

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara melibatkan berbagai pihak seperti BAPPEDA yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program bedah rumah lewat program BSPS di kalangan masyarakat miskin dan Dinas Sosial yang bertanggung jawab memberikan bantuan (BPNT, PBI, dan PKH) menyeluruh kepada masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin di kabupaten Luwu Utara. Keberhasilan ini dapat dilihat dari menurunnya kemiskinan kabupaten Luwu Utara pada tahun 2022 sampai sekarang yang

dibuktikan dengan data kemiskinan yang turun secara signifikan yang membuat kabupaten Luwu Utara tidak lagi menjadi bagian 3 kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan. Namun dari sisi masyarakat keberhasilan yang dicapai pemerintah belum nampak pada realitanya dikarenakan banyaknya indikator kemiskinan dan bantuan yang diberikan tidak bisa dikatakan membantu sepenuhnya dalam artian mengubah masyarakat yang tadinya miskin menjadi tidak miskin. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin Kabupaten Luwu Utara ada beberapa komponen di antaranya yaitu, untuk komponen non-makanan diberikan program bedah rumah yang dilaksanakan melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) serta bantuan lain yang diberikan secara tunai seperti BPNT, PBI, dan PKH.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, A. D. (2024). *Bansos PBI JK 2024 Cair Rp 504 Ribu! Cek Manfaat Beserta Cara Cek Penerima Bansos PBI JK*. Umsu.Ac.Id. <https://umsu.ac.id/artikel/bansos-pbi-jk-2024-cair-rp-504-ribu-cek-manfaat-beserta-cara-cek-penerima-bansos-pbi-jk/#:~:text=Program Bansos PBI JK adalah,karena sudah ditanggung oleh pemerintah.>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. BPS.
- Binus University. (2020). *Pentingnya Pendidikan Berkualitas Demi Tingkatkan SDM Yang Handal*. <https://online.binus.ac.id/>
- Davis, E. P., & Sanchez-martinez, M. (2014). A review of the economic theories of poverty. *National Institute of Economic and Social Research*, 435, 1–65.
- Eide, E. R., & Showalter, M. H. (2010). *Human Capital* (P. Peterson, E. Baker, & B. B. T.-I. E. of E. (Third E. McGaw (eds.); pp. 282–287). Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.01213-6>
- I Nengah Sinarta, Nyoman Nuri Arthana, Endra Prasandya, K. D., & Kurniawan, A. (2022). Program Bedah Rumah Sebagai Bentuk Sosial Untuk Minimalisir Rumah Tidak Layak Huni. *Jurnal Abdi Daya*, 2(1), 31–38. <https://doi.org/10.22225/jad.2.1.2022.31-38>
- Michael Page, I. (2022). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Perkapita Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2019*. 5(1), 81–97.
- Miles A.M, M. B. & H. (1994). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis (2nd Edition). In *Sage Publications* (Issue 2nd Edition).
- Perekonomian, K. K. B., & Indonesia, R. (2024). *Wujudkan Perencanaan Pembangunan yang Tepat Sasaran dan Berkelanjutan, Pemerintah Dukung Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi*. Ekon.Go.Id. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5834/wujudkan-perencanaan-pembangunan-yang-tepat-sasaran-dan-berkelanjutan-pemerintah-dukung-pemanfaatan-data-registrasi-sosial-ekonomi>
- Rowntree, B. S. (1901). *A study of town life*. 44(0).
- Sahar, A. R., & Salomo, R. V. (2018). Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Pinrang. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 4(2), 49–64. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v4i2.1305>
- Zaqiah, A., Triani, M., & Yeni, I. (2023). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(3), 33. <https://doi.org/10.24036/jkep.v5i3.15284>